



P D R B Lapangan Usaha Kota Depok 2014



Kerjasama

BAPPEDA Kota Depok

Dengan



Badan Pusat Statistik Kota Depok

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
LAPANGAN USAHA
KOTA DEPOK
2014**

<https://depokkota.bps.go.id>

PDRB LAPANGAN USAHA KOTA DEPOK 2014

No. Publikasi / *Publication Number* : 3276.1505
No. Katalog / *Catalog Number* : 9302003.3276
Ukuran Buku / *Book Size* : 28 Cm x 21,5 Cm
Jumlah Halaman / *Total Size* : 66 Halaman / *page*

Naskah / *Manuscript*:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit dan Setting / *Cover Design and Setting* :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh / *Published By*:
BPS Kota Depok / *BPS – Statistic of Depok Region*

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya
May be cited with reference to the sources

Kata Sambutan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

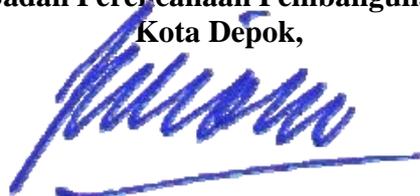
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok Tahun 2014 dapat diterbitkan. Buku Produk Domestik Regional Bruto ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik Kota Depok dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok yang telah terjalin sejak berdirinya Kota Depok.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2014 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di Kota Depok, khususnya untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi Pemerintahan dan Swasta.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2014 ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, Desember 2015
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Depok,



drg. H. HARDIONO, Sp.BM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19610127 198503 1 001

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Kota Depok Tahun 2014 dapat diterbitkan.

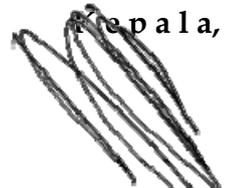
PDRB disajikan menurut lapangan usaha yang terdiri dari sembilan sektor ekonomi diharapkan dapat memberi gambaran secara makro hasil pembangunan di Kota Depok khususnya untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kami sadari publikasi ini masih belum sempurna, kekurangan dan kesalahan mungkin saja terjadi. Untuk perbaikan yang akan datang kritik dan saran sangat kami nantikan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk keperluan penelitian, evaluasi dan perencanaan di wilayah Kota Depok.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, Desember 2015
Badan Pusat Statistik Kota Depok
Depok,



Tata Djumantara, B.St
Pembina Tingkat I
NIP. 195806131983021001

Daftar Isi

Kata Sambutan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Kegiatan Ekonomi.....	3
1.4. Konsep dan Definisi.....	4
1.5. Konsep Pendapatan Regional	7
BAB II METODOLOGI.....	10
2.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto.....	10
2.2. Beberapa Pendekatan Penyusunan PDRB.....	10
2.3. Pendapatan Regional.....	11
2.4. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	12
2.5. PDRB Per Kapita.....	12
2.6. Metode Penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha	12
2.7. Penyajian Angka Indeks	16
2.8. Cara Penyajian	18
BAB III URAIAN SEKTORAL.....	19
3.1. Sektor Pertanian.....	19
3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	22
3.3. Sektor Industri Pengolahan.....	22
3.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum.....	23
3.5. Sektor Bangunan	25
3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	25

3.7. Sektor Angkutan dan Komunikasi	27
3.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	29
3.9. Sektor Jasa-jasa	31

BAB IV STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

KOTA DEPOK TAHUN 2010-2014	34
4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	34
4.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	37
4.3. Struktur Ekonomi.....	39
4.4. Indeks Harga Implisit	41
4.5. PDRB Perkapita.....	43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran	47

Daftar Tabel

Tabel A. Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014	35
Tabel B. Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok atas dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014.....	36
Tabel C. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2010-2014.....	37
Tabel D. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014	40
Tabel E. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Kota Depok Tahun 2010-2014	42
Tabel F. PDRB, Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio Kota Depok Tahun 2010-2014.....	50

LAMPIRAN

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014	49
Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014.....	50
Tabel 2.1 Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014	51
Tabel 2.2 Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014	52
Tabel 3.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014.....	53
Tabel 3.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014.....	54
Tabel 4 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Depok Tahun 2010-2014.....	55

Tabel 5	Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Depok Tahun 2010-2014	56
Tabel 6.1	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor di Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014.....	57
Tabel 6.2	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor di Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014.....	57
Tabel 7.1	Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor di Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014.....	58
Tabel 7.2	Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor di Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014	58
Tabel 8.1	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor di Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014.....	59
Tabel 8.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor di Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014	59
Tabel 9	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Depok Tahun 2010-2014	60
Tabel 10	Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor di Kota Depok Tahun 2010-2014.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional di samping terus mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total suatu masyarakat/penyesuaian system sosial secara keseluruhan menuju kondisi yang lebih baik (Todaro, 2004:17). Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989).

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan bermacam-macam data statistik yang akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan dan mengarahkan sasaran pembangunan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil pada masa-masa yang lalu perlu dievaluasi hasil dan implikasinya pada masyarakat. Dengan demikian data statistik yang merupakan ukuran kuantitas sangat diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu dan keadaan masa sekarang serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau sektor tersier.

Untuk mengetahui besarnya peningkatan pendapatan masyarakat dan besarnya pergeseran kegiatan ekonomi di suatu daerah dibutuhkan data statistik pendapatan

regional secara berkala yang umumnya juga digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini telah menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu evaluasi hasil pembangunan di daerah tidak cukup dengan potret ekonomi dari propinsi ataupun kabupaten/kota saja, melainkan sampai ke tingkat kecamatan. Untuk itu data statistik Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kota Depok sangat diperlukan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan selama ini serta kaitannya dengan menentukan sasaran-sasaran pada masa yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan bermacam-macam data statistik yang dapat dijadikan bahan untuk evaluasi pembangunan ekonomi yang telah tercapai dan perencanaan dimasa yang akan datang.

Salah satu data statistik yang sangat diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara series.

Pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini telah menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu evaluasi hasil pembangunan di daerah memerlukan gambaran keadaan ekonomi. Untuk itu data statistik Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok sangat diperlukan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan selama ini serta kaitannya dengan menentukan sasaran-sasaran pembangunan pada masa yang akan datang.

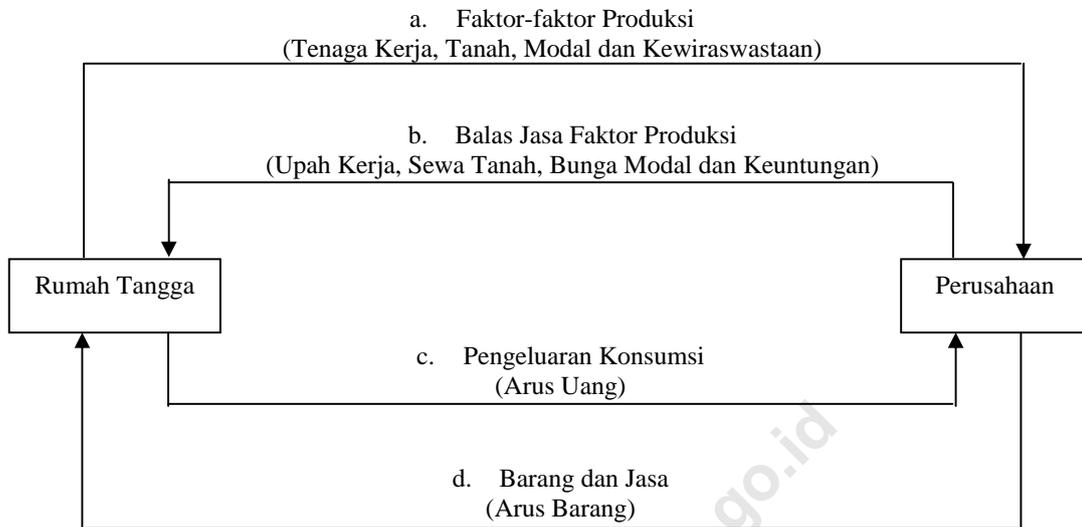
Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan masyarakat, mengusahakan penggeseran kegiatan ekonomi dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier serta meningkatkan eksport ke luar negeri.

Dengan tersedianya data statistik Produk Domestik Regional Bruto secara berkala dapat diketahui antara lain :

- a. Kemampuan sumber daya ekonomi yang diperlihatkan oleh nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku.
- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh dari Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
- c. Tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dengan membandingkan PDRB perkapita dengan daerah lain.
- d. Tingkat inflasi yang merupakan persentase perubahan Indeks Harga Implisit dua tahun yang berurutan. Peningkatan pendapatan akan tidak berarti jika tingkat inflasi tinggi. Dengan kata lain peningkatan pendapatan tidak berarti bila diiringi dengan penurunan daya beli uang (Rupiah) terhadap barang dan jasa (terbatasnya persediaan barang dan jasa).
- e. Gambaran struktur perekonomian yang merupakan kontribusi masing-masing sektor kegiatan ekonomi terhadap pembentukan PDRB.

1.3. Kegiatan Ekonomi

Siklus kegiatan ekonomi sebagai prinsip dasar ekonomi makro merupakan interaksi antara produsen dan konsumen melalui berbagai transaksi yang terjadi, baik mengenai arus barang dan jasa maupun faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam kegiatan ekonomi tersebut. Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen adalah: Tenaga kerja, Tanah, Modal dan Kewiraswastaan. Balas jasa faktor produksi adalah : Upah/gaji, Sewa tanah, Bunga modal dan Keuntungan. Sewa tanah, bunga modal dan keuntungan untuk selanjutnya dikatakan Surplus Usaha (dalam prakteknya sulit dipisahkan). Jumlah dari balas jasa atas keempat faktor produksi tersebut dikatakan *nilai tambah (value added)*. Siklus kegiatan ekonomi ini secara sederhana digambarkan sebagai berikut :



Secara umum kegiatan ekonomi di atas diuraikan dalam format Neraca Produksi suatu usaha sebagai berikut:

Pendapatan/Penerimaan	Pengeluaran/Pembayaran
1. Output antara	5. Input antara
2. Konsumsi akhir	6. Impor barang dan jasa
3. Investasi (Pembentukan barang modal dan perubahan stok)	7. Upah/gaji
4. Ekspor barang dan jasa	8. Surplus usaha *)
	9. Penyusutan
	10. Pajak tak langsung neto **)

*) Sewa tanah + Bunga modal + Keuntungan

***) Pajak tak langsung – Subsidi

1.4. Konsep dan Definisi

Beberapa penjelasan mengenai pengertian PDRB, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, pendapatan regional, pendapatan perkapita dan lainnya diuraikan di bawah ini.

1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat diartikan ke dalam 3 pengertian yaitu :

a. Pendekatan Produksi (*Production approach*)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/*region* pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Formulasi penghitungan nilai tambah bruto pendekatan produksi sebagai berikut :

$$\text{NTB} = \text{Nilai Produksi (NP)} - \text{Biaya Antara (BA)}$$

b. Pendekatan Pendapatan (*Income approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut didalam proses produksi di suatu wilayah/*region* pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Dalam pengertian PDRB termasuk pula penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (Pajak tak langsung – subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

$$\text{NTB} = \text{Upah/gaji} + \text{Surplus usaha} + \text{Penyusutan} + \text{Pajak tak langsung netto}$$

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure approach*)

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (lembaga nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, ekspor neto di suatu wilayah/*region*. Ekspor neto disini adalah ekspor dikurangi import.

$$\text{NTB} = \text{Konsumsi akhir (Rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba)} + \text{Pembentukan modal tetap bruto} + \text{Perubahan stok} + \text{ekspor neto}$$

1.4.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

1.4.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu atau tahun dasar, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

1.4.4. Indeks Harga Implisit PDRB

Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan.

1.4.5. Laju Pertumbuhan PDRB

Besarnya persentase kenaikan PDRB pada tahun berjalan terhadap PDRB pada tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan biasanya disebut *Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)*.

1.4.6. PDRB Perkapita

PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

1.4.7. Pendapatan Regional

PDRB ditambah balas jasa faktor produksi milik penduduk wilayah/*region* tersebut yang berasal dari luar dikurangi balas jasa faktor produksi yang mengalir keluar.

1.4.8. Pendapatan Perkapita

Pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehubungan dengan penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kota Depok sulit dilakukan karena masih belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten/kota, maka sampai saat ini penyajian data ekonomi makro hanyalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian angka PDRB ini merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Dengan kata lain PDRB merupakan gambaran “*product originated*”.

1.5. Konsep Pendapatan Regional

1.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang ada dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.

1.5.2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar merupakan hasil pengurangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar dan penyusutan.

1.5.3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Harga Faktor

Jika PDRN Atas Dasar Harga Pasar dikurangi Pajak Tidak Langsung Netto maka diperoleh PDRN Atas Dasar Biaya Faktor. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak pertambahan nilai, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak penghasilan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli sehingga mengakibatkan kenaikan harga barang. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi dapat mengakibatkan penurunan harga. Pajak tidak langsung dikurangi subsidi diperoleh pajak tidak langsung.

1.5.4. Pendapatan Regional

Dari beberapa konsep yang diterangkan di atas, ternyata PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang turut dalam proses produksi di region tersebut. PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang ada atau merupakan pendapatan yang berasal dari region tersebut. Pendapatan yang dihasilkan itu tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk region tersebut karena ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk region lain. Jika pendapatan regional dibagi jumlah penduduk yang tinggal di region dimaksud maka menghasilkan suatu pendapatan perkapita.

1.5.5. Pendapatan Perorang (*Personal Income*) dan Pendapatan Yang Siap Dibelanjakan (*Disposable Income*)

Berdasarkan uraian di atas, konsep-konsep yang dipakai dalam pendapatan regional dapat diurutkan sebagai berikut :

- (1). PDRB Atas Dasar Harga Pasar (*GRDP At Market Prices*). Minus : Penyusutan, akan sama dengan
- (2). PDRN Atas Dasar Harga Pasar (*NRDP At Market Prices*). Minus : Pajak tidak langsung netto, akan sama dengan
- (3). PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (*NRDP At Factor Cost*). Plus : Pendapatan netto yang mengalir dari luar daerah / luar negeri, akan sama dengan
- (4). Pendapatan Regional (*Regional Income*). Minus : Pajak pendapatan perusahaan (*Corporate Income Taxes*), keuntungan yang tidak dibagikan (*Undistributed Profit*), iuran kesejahteraan sosial (*Social Security Contribution*). Plus : Transfer yang diterima oleh rumahtangga, bunga netto atas hutang pemerintah, akan sama dengan
- (5). Pendapatan Perorang (*Personal Income*). Minus : Pajak rumahtangga, transfer yang dibayarkan oleh rumahtangga, akan sama dengan
- (6). Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*).

Diagram susunan agregat pendapatan regional dapat dilihat pada halaman berikut ini.

SUSUNAN AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL

Susunan Agregat Pendapatan Regional Terdiri dari :

- a. Upah dan Gaji
- b. Sewa Tanah, Royalti
- c. Bunga Modal
- d. Keuntungan (dividen dan laba ditahan)
- e. Penyusutan
- f. Pajak tidak langsung neto

Biaya antara (bibit, pupuk, obat-obatan, bahan baku, bahan penolong, listrik, jasa perbankan, alat-alat, sewa bangunan dan mesin, jasa lainnya, dan sebagainya tidak termasuk pembelian barang modal

Penyusutan

Pajak tidak langsung neto

Pajak pendapatan perusahaan, keuntungan yang tidak dibagikan, iuran kesejahteraan sosial

Pajak Rumah Tangga + Transfer oleh rumah tangga

Pendapatan netto dari luar daerah/luar negeri

Transfer yang diterima rumah tangga + Bunga netto hutang pemerintah

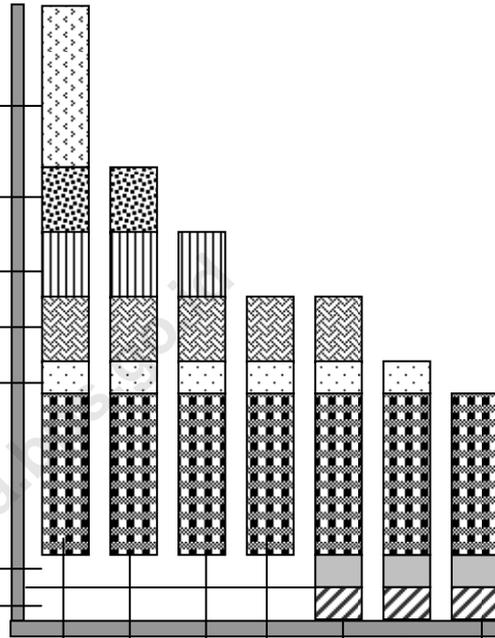
Singkatan

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

PDRN : Produk Domestik Regional Netto

PRN : Produk Regional Netto

- Total Output
- PDRB atas dasar harga pasar
- PDRN atas dasar harga pasar
- PDRN atas dasar harga faktor
- PRN biaya faktor (pendapatan regional)
- Pendapatan orang seorang (personal income)
- Pendapatan siap dibelanjakan (disposable income)



BAB II

METODOLOGI

2.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan kepemilikan.

2.2. Beberapa Pendekatan Penyusunan PDRB

Pendekatan penyusunan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari data dasar masing-masing daerah. Metode langsung tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam pendekatan yaitu: pendekatan produksi (*Production Approach*), pendekatan pendapatan (*Income Approach*), dan pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDRB dengan memakai berbagai macam indikator produksi atau indikator lainnya yang cocok sebagai alokator.

2.2.1. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor.

2.2.2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan

dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan kotor.

2.2.3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di dalam suatu wilayah. Jadi produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode penjualan eceran dan metode penilaian eceran.
- b. Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran belanja, metode balance sheet dan metode statistik luar negeri.

Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor antar negara).

2.3. Pendapatan Regional

Istilah Pendapatan Regional merupakan sebutan yang lebih populer dalam publikasi PDRB. Namun dalam kenyataannya, pendapatan regional sulit untuk dihitung mengingat sukarnya mendeteksi arus pendapatan yang mengalir antar regional/provinsi. Oleh karena keterbatasan tersebut, maka yang sering atau umum dipakai adalah Produk Domestik Regional Netto (PDRN). PDRN Atas Biaya Faktor Produksi merupakan PDRB setelah dikeluarkan biaya penyusutan barang-barang modal karena aus akibat digunakan dalam proses produksi, dan pajak tidak langsung netto (pajak setelah dikurangi subsidi pemerintah).

2.4. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

Jumlah penduduk yang biasa digunakan sebagai pembagi dalam penghitungan PDRB agar diperoleh pendapatan per kapita adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Jumlah penduduk tersebut merupakan rata-rata jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan penduduk pertengahan tahun adalah jumlah penduduk pada akhir tahun ditambah penduduk awal tahun dibagi dua.

2.5. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

2.6. Metode Penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha

Beberapa metode yang digunakan untuk menghitung nilai PDRB suatu wilayah, antara lain Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung. Metode yang digunakan secara garis besar adalah sebagai berikut:

2.6.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Dalam melakukan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

2.6.1.1. Metode Langsung

Metode Langsung adalah melakukan penghitungan PDRB yang didasarkan kepada data yang tersedia di lapangan secara rutin. Dalam metode langsung ini ada tiga pendekatan, yaitu:

- Pendekatan Produksi
- Pendekatan Pendapatan
- Pendekatan Pengeluaran

Ketiga pendekatan ini sudah diuraikan pada bagian sebelumnya dan secara teoritis ketiga pendekatan tersebut akan memberikan hasil yang sama.

2.6.1.2. Metode Tidak Langsung/Alokasi

Penghitungan nilai tambah bruto suatu kegiatan ekonomi/sector dengan metode tidak langsung adalah dengan mengalokasikan nilai tambah bruto suatu kegiatan ekonomi Nasional/regional Propinsi ke dalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional Kabupaten/Kotamadya menggunakan indikator yang mempunyai pengaruh paling erat dengan kegiatan ekonomi tersebut. Secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$NTB_k = \frac{Q_k}{Q_p} NTB_p$$

Dimana :

NTB_k = Nilai tambah bruto tingkat II

NTB_p = Nilai tambah bruto propinsi

Q_k = Produksi/Indikator produksi tingkat II

Q_p = Produksi/Indikator produksi propinsi

2.6.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi.

Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan, yaitu :

2.6.2.1. Revaluasi

Metoda revaluasi menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun atau tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (2000). Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan (tahun 2000). Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih nilai output dan biaya antara. Dalam praktek sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

$$NP_{t_0} = Q_t P_0$$
$$NTB_{t_0} = [1 - RBA_0] NP_{t_0}$$

Dimana :

NP_{t_0} = Nilai produksi atas dasar harga konstan (adhk) tahun t

NTB_{t_0} = Nilai tambah bruto adhk tahun t

Q_t = Produksi/indikator produksi tahun t

P_0 = Harga tahun dasar

RBA_0 = Ratio biaya antara tahun dasar

2.6.2.2. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah masing-masing sektor harga konstan pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap penghitungan output atas dasar harga konstan kemudian dengan menggunakan ratio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

$$NP_{t_0} = \frac{NP_0 IQ_t}{100}$$

Dimana :

NP_0 = Nilai produksi tahun dasar

IQ_t = Indeks kuantum tahun t

2.6.2.3. Deflasi

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga yang berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar (IHPB) dan sebagainya. Indeks harga

$$NTB_{t_0} = \frac{100 NTB_t}{IH_t}$$

di atas dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

Dimana :

NTB_t = Nilai tambah bruto tahun t

IH_t = Indeks Harga tahun t

2.6.2.4. Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai. Penghitungan komponen penggunaan PDRB atas dasar harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara di atas, tetapi mengingat data yang tersedia maka digunakan cara deflasi dan ekstrapolasi.

$$BA_{t_0} = \frac{100 BA_t}{IH_t} \quad NP_{t_0} = \frac{100 NP_t}{IH_t} \quad NTB_{t_0} = NP_{t_0} - BA_{t_0}$$

Dimana :

NP_t = Nilai produksi tahun t

BA_t = Biaya Antara tahun t

BA_{t_0} = Biaya Antara adhk tahun t

2.6.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atau *Economic Growth* merupakan indeks berantai dari masing-masing kegiatan ekonomi. Angka indeks yang dihasilkan bisa didasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering digunakan atau dianalisis oleh para ekonom adalah LPE harga konstan, karena menggambarkan pertumbuhan produksi riil dari masing-masing sektor.

Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan cara membagi selisih nilai PDRB sektor/sub sektor tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB sektor/sub sektor tahun sebelumnya dikalikan 100.

2.7. Penyajian Angka Indeks

Untuk mempermudah dalam menganalisisnya, PDRB disamping disajikan dalam bentuk angka absolut, disajikan juga dalam bentuk angka indeks. Secara rinci angka indeks tersebut adalah sebagai berikut:

2.7.1. Indeks Perkembangan

Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan pendapatan/perekonomian dari tahun ke tahun yang dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$IP = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i0}} \times 100 \%$$

Dimana :

IP = Indeks Perkembangan

- i = Sektor 1 ... 9
- t = Tahun t
- 0 = Tahun dasar

2.7.2. Indeks Berantai

Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks berantai diperoleh dengan cara membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Indeks berantai dirumuskan sebagai berikut :

$$IB = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

- IB = Indeks berantai
- i = Sektor 1 ... 9
- t = Tahun t
- t-1 = Tahun sebelumnya

2.7.3. Indeks Implisit

Indeks ini merupakan indikator tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Indeks Implisit diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai sejenis atas dasar harga konstan kemudian dikalikan 100. Indeks Implisit dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IH = \frac{PDRB_{hb\ it}}{PDRB_{hk\ it}} \times 100 \%$$

Dimana:

- IH = Indeks Implisit
- i = Sektor 1 ... 9
- t = Tahun t
- hb = Harga berlaku
- hk = Harga konstan

2.8. Cara Penyajian

Penyajian PDRB dibedakan dalam dua bentuk :

a. Penyajian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Penyajian PDRB atas dasar harga berlaku ini untuk melihat besarnya PDRB berdasarkan harga pada tahun tersebut.

b. Penyajian PDRB Atas Dasar Harga Kostan (2000)

Penyajian PDRB atas dasar harga konstan 2000 ini untuk melihat perkembangan nilai PDRB dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil dan bukan disebabkan kenaikan harga.

Untuk dapat menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi di setiap sektor, maka penyajian PDRB dirinci menurut 9 sektor lapangan usaha yaitu :

- a. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.
- b. Pertambangan dan Penggalian.
- c. Industri Pengolahan.
- d. Listrik, Gas dan Air Minum.
- e. Bangunan/Konstruksi.
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran.
- g. Pengangkutan dan Komunikasi.
- h. Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
- i. Jasa-jasa

BAB III

URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan pada bagian ini mencakup ruang lingkup dari masing-masing sektor kegiatan ekonomi dan cara-cara penghitungan nilai tambah bruto (NTB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 serta dengan sumber data yang digunakan.

United Nation (UN) memberikan rekomendasi, secara makro perekonomian diklasifikasikan menjadi 9 sektor yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas Kota dan Air Bersih
5. Konstruksi/Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

3.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya uraian sub sektor tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1. Tanaman Bahan Makanan

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil-hasil produksi ikutannya. Termasuk pula hasil-hasil pengolahan yang dilakukan secara sederhana seperti beras tumbuk, galek dan sagu.

Data produksi diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian, sedangkan data harga seluruhnya bersumber pada harga yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik.

Nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan terlebih dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya dikurangi biaya antara. Biaya antara diperoleh dengan menggunakan ratio biaya antara terhadap output yang merupakan hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.1.2. Tanaman Perkebunan

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat dan perusahaan seperti komoditi karet, kelapa, kopi, kapok, teh, tebu, tembakau, cengkeh dan sebagainya termasuk produksi ikutannya.

Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian, sedangkan data harga berupa harga perdagangan besar yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan terlebih dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya dikurangi biaya antara. Biaya antara diperoleh dengan menggunakan ratio biaya antara terhadap output yang merupakan hasil SKPR.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya

Subsektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak seperti : susu segar, kulit, dan telur, yang dimaksud dengan produksi peternakan adalah banyaknya ternak yang lahir dan penambahan berat ternak. Produksi peternakan dihitung berdasarkan perkiraan dengan menggunakan rumus :

Produksi = Jumlah pematangan + (populasi akhir tahun - populasi awal tahun) + (ternak keluar - ternak masuk)

Data jumlah ternak yang dipotong, populasi ternak, dan keluar masuk ternak diperoleh dari Dinas Pertanian, sedangkan data harga diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian dikurangi dengan biaya antara. Biaya antara diperoleh dengan menggunakan ratio biaya antara terhadap output yang merupakan hasil SKPR.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.1.4. Kehutanan

Subsektor ini mencakup komoditi kayu pertukangan, kayu bakar, arang, rotan, dan lain-lain. Data produksi dan harga diperoleh dari Perum Perhutani atau dari Kantor Wilayah Kehutanan.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan terlebih dahulu jenis produksi kehutanan dengan masing-masing harganya, kemudian dikurangi biaya antara. Biaya antara diperoleh dengan mengalikan ratio biaya antara terhadap output yang merupakan hasil SKPR.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.1.5. Perikanan

Subsektor ini mencakup kegiatan perikanan laut, perikanan darat, dan pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman ikan).

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan metoda langsung yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output perikanan diperoleh dari Dinas Pertanian, sedangkan biaya antara diperoleh dari hasil perkalian ratio biaya antara terhadap outputnya. Besarnya ratio biaya antara diperoleh dari SKPR.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor ini mencakup kegiatan-kegiatan penggalian, pemboran, pengambilan dan pemanfaatan segala macam barang seperti benda non biologis, barang-barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik yang berupa benda padat maupun benda gas.

3.2.1. Pertambangan

Subsektor ini mencakup komoditi minyak mentah, gas bumi, batubara, biji emas dan perak. Data produksi dan harga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan terlebih dahulu setiap jenis produksi dengan harganya kemudian dikurangi biaya antara yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.2.2. Penggalian

Subsektor ini mencakup kegiatan penggalian dan pengambilan segala macam barang galian seperti batu kapur, pasir, batu-batuan dan sebagainya.

Data produksi dan harga diperoleh dari Dinas Pertambangan, sedangkan biaya antara diperoleh dari perkalian ratio biaya antara dengan nilai outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflatornya IHPB untuk barang galian.

3.3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini terdiri dari industri pengolahan minyak dan gas bumi serta industri pengolahan bukan migas.

3.3.1. Industri Minyak dan Gas (Migas)

Subsektor ini mencakup kegiatan pengolahan, pengilangan minyak bumi dan gas alam cair seperti premium, minyak tanah, minyak diesel, avtur, avigas dan sebagainya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Data nilai output dan biaya antara diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflatornya IHPB hasil pengilangan minyak bumi.

3.3.2. Industri Tanpa Migas

Subsektor ini mencakup industri besar dan sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumahtangga. Industri besar dan sedang mencakup perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 19 orang, sedangkan industri kecil 5 sampai 19 orang dan industri kerajinan rumahtangga dengan tenaga kerja 1 sampai 4 orang.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku industri besar dan sedang dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi yaitu nilai output dikurangi biaya antara.

Nilai output dan biaya antara diperoleh dari Survei tahunan Industri Besar dan Sedang yang setiap tahun dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Sedangkan untuk industri kecil dan rumahtangga dilakukan estimasi berdasarkan indikator jumlah tenaga kerja dan rata-rata output pertenaga kerja hasil suatu survei industri kecil dan rumahtangga yang dilakukan BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflatornya IHPB barang-barang industri.

3.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum

3.4.1. Listrik

Subsektor ini mencakup kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Non PLN.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan metoda pendekatan produksi yaitu nilai output dikurangi biaya antara.

Nilai output diperoleh dari perkalian produksi listrik PLN dan Non PLN dengan tarif listrik yang datanya diperoleh dari PLN dan Survei Listrik Non PLN, sedangkan biaya antara diperoleh dari hasil perkalian ratio biaya antara dengan nilai outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.4.2. Gas Kota

Subsektor ini mencakup penyediaan gas kota yang biasanya diusahakan oleh Perusahaan Gas Negara (PN Gas).

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output dan biaya antara diperoleh dari Survei Gas yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda ekstrapolasi dengan ekstrapolatornya indeks produksi gas.

3.4.3. Air Minum

Subsektor ini mencakup kegiatan pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyaluran baik yang dilakukan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) maupun bukan PAM.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output dan biaya antara diperoleh dari Survei Air Minum yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.5. Sektor Bangunan

Subsektor ini mencakup kegiatan pembangunan fisik (Konstruksi), baik yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi maupun yang dilakukan oleh perorangan.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output dan biaya antara diperoleh dari Survei Perusahaan Konstruksi AKI dan Non AKI ditambah dengan kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh perorangan (individu).

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflator IHPB barang bangunan.

3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

3.6.1. Perdagangan Besar dan Eceran

Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya atau pedagang eceran.

Pedagang eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga, tanpa merubah sifat, baik barang baru maupun barang bekas.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda arus barang (*Commodity Flow*) yaitu output dihitung berdasarkan besarnya margin perdagangan yang timbul akibat perdagangan barang-barang dari sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri serta barang dari Impor dikurangi biaya antara.

3.6.2. Hotel

Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi

.....
disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen dan sebagainya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output diperoleh dari perkalian jumlah kamar yang terjual dengan rata-rata tarif per kamar.

Biaya antara diperoleh dari perkalian ratio biaya antara hasil SKPR dengan nilai outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.6.3. Restoran

Subsektor ini mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang umumnya dikonsumsi di tempat penjualan.

Kegiatan yang termasuk dalam subsektor ini seperti rumah makan, warung nasi, warung sate, warung kopi, katering, kantin dan lain-lain.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output diperoleh dengan cara mengalikan pengeluaran makanan dan minuman per kapita selama setahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Biaya antara diperoleh dari perkalian ratio biaya antara yang diperoleh dari SKPR dengan nilai outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflatornya indeks harga konsumen (IHK) makanan.

3.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

3.7.1. Angkutan

3.7.1.1. Angkutan Rel

Subsektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh Perusahaan Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output dan biaya antara diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan Umum Kereta Api.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda ekstrapolasi dengan ekstrapolatornya indeks penumpang dan barang.

3.7.1.2. Angkutan Jalan Raya

Subsektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk disini kegiatan lainnya seperti sewa (*charter*) kendaraan, baik dengan atau tanpa pengemudi.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output diperoleh dari hasil perkalian jumlah kendaraan umum dan rata-rata output perkendaraan.

Biaya antara diperoleh dari perkalian ratio biaya antara hasil SKPR dengan nilai outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan metoda revaluasi.

3.7.1.3. Angkutan Laut

Subsektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara. Nilai output dan biaya antara diperoleh dari SKPR.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metode ekstrapolasi dengan ekstrapolatornya indeks jumlah penumpang dan barang.

3.7.1.4. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan

Subsektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau, baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyebrangan dengan alat angkut kapal ferri.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara. Nilai output dan biaya antara diperoleh dari SKPR.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda ekstrapolasi dengan ekstrapolatornya indeks jumlah penumpang dan barang.

3.7.1.5. Angkutan Udara

Subsektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara. Nilai output dan biaya antara diperoleh dari SKPR.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan

Subsektor ini mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan yaitu jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang, ekspedisi, jalan tol dan lain-lain.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara. Output dan biaya antara diperoleh dari SKPR.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflatornya indeks harga konsumen (IHK) umum.

3.7.2. Komunikasi

Subsektor ini mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi.

Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket yang diusahakan oleh PT. Pos Indonesia.

Telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon dan telex yang diusahakan oleh PT. Telekomunikasi dan PT. Indosat.

Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel), radio panggil (pager), dan telepon selular (ponsel).

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output dari kegiatan pos dan giro dan telekomunikasi diperoleh dari Laporan Keuangan PT. Pos Indonesia dan PT. Telekomunikasi, sedangkan penunjang komunikasi diperoleh dari survei seperti wartel dan alokasi (seperti radio panggil, telepon selular).

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda ekstrapolasi dengan ekstrapolatornya jumlah surat yang dikirim untuk kegiatan pos dan giro dan jumlah pulsa untuk kegiatan komunikasi.

3.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

3.8.1. B a n k

Subsektor ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman, baik kredit jangka pendek, menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga dan sebagainya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara. Nilai output dan biaya antara diperoleh dari Laporan Bank Indonesia (BI)

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflatornya indeks harga konsumen (IHK) umum.

3.8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Subsektor ini mencakup kegiatan asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam, lembaga pembiayaan, pedagang valuta asing, pasar modal dan jasa penunjang seperti pialang, penjamin emisi dan sebagainya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara. Nilai output dan biaya antara diperoleh dari SKPR.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflatornya indeks harga konsumen (IHK) umum.

3.8.3. Sewa Bangunan

Subsektor ini mencakup kegiatan usaha persewaan bangunan dan tanah baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan, serta usaha persewaan tanah persil.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Nilai biaya antara diperoleh dari perkalian pengeluaran pemeliharaan rumah per kapita dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflatornya indeks harga konsumen (IHK) perumahan.

3.8.4. Jasa Perusahaan

Subsektor ini mencakup kegiatan memberikan jasa hukum (Advokat dan Notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output diperoleh dari perkalian jumlah perusahaan dengan rata-rata output per perusahaan hasil SKPR. Biaya antara diperoleh dengan cara mengalikan ratio biaya antara dengan nilai outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.9. Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa dikelompokkan kedalam 2 subsektor yaitu:

- a. Subsektor Jasa Pemerintahan Umum
- b. Subsektor Jasa Swasta

3.9.1. Jasa Pemerintahan Umum

Subsektor ini mencakup kegiatan jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan pemerintah serta masyarakat umum. Sebagai contoh jasa pemerintahan umum, pertahanan dan keamanan dan sebagainya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan pendekatan pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda deflasi dengan deflatornya indeks harga konsumen (IHK) umum.

3.9.2. Jasa Swasta

Subsektor ini meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan pihak swasta, misalnya jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga.

3.9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan

Subsektor ini mencakup kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat (YPAC), rumah ibadat dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output diperoleh dari hasil perkalian jumlah indikator produksi seperti jumlah murid, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah panti asuhan dan sebagainya dengan rata-rata output per masing-masing indikator dari hasil survei SKPR. Biaya antara diperoleh dari perkalian ratio biaya antara dengan nilai outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.9.2.2. Jasa Hiburan dan Rekreasi

Subsektor ini mencakup kegiatan jasa bioskop, kebun binatang, taman hiburan, pub, bar, karaoke, diskotik, kolam renang dan kegiatan hiburan lainnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output diperoleh dari hasil perkalian jumlah pengunjung/penonton dengan rata-rata tarif per pengunjung/penonton hasil survei SKPR. Biaya antara diperoleh dari perkalian ratio biaya antara dengan nilai outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

3.9.2.3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Subsektor ini mencakup kegiatan yang pada umumnya melayani perorangan dan rumahtangga seperti jasa reparasi, pembantu rumahtangga, tukang cukur, tukang jahit, semir sepatu dan sejenisnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi yaitu output dikurangi biaya antara.

Nilai output diperoleh dari hasil perkalian jumlah masing-masing jenis kegiatan usaha jasa perorangan dan rumah tangga dengan rata-rata output per masing-masing jenis kegiatan tersebut. Biaya antara diperoleh dari perkalian ratio biaya antara dengan nilai outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung menggunakan metoda revaluasi.

<https://depokkota.bp.go.id>

BAB IV

STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

KOTA DEPOK

TAHUN 2010 - 2014

4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Nilai PDRB ini disajikan atas dasar harga berlaku yaitu dengan memperhitungkan pengaruh harga dan atas dasar harga konstan yaitu dengan menghilangkan pengaruh harga.

Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga yang biasanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi kota Depok tahun 2014 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 7,09 persen dari 6,92 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok masih diatas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebesar 5,07 persen, juga di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi di Kota Depok meningkat lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat maupun nasional.

Dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 23.261.048,75 juta, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kota Depok pada tahun 2014 ini mencapai Rp 26.734.548,37 juta atau mengalami peningkatan sebesar 14,93 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 7,09 persen dari Rp 7.960.537,94 juta tahun 2013 menjadi Rp 8.525.129,16 juta pada tahun 2014. Selanjutnya PDRB Kota Depok periode 2010-2014 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran di Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Selain pengelompokan atas sektor lapangan usaha, biasanya nilai PDRB juga disajikan atas kelompok sektor ekonomi seperti terlihat pada tabel A dan tabel B yang terdiri atas :

1. **Sektor Primer**, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalian.
2. **Sektor Sekunder**, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Bangunan.
3. **Sektor Tersier**, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan Jasa-jasa.

**TABEL A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DEPOK
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2009-2013 (Juta Rp)**

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014*)
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A. PRIMER	356.720,80	375.014,31	392.520,48	447.897,48	490.413,17
1. PERTANIAN	356.720,80	375.014,31	392.520,48	447.897,48	490.413,17
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SEKUNDER	7.209.366,59	7.898.492,49	8.868.394,36	10.205.717,81	11.752.196,83
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5.804.133,77	6.334.561,58	7.060.126,99	7.945.220,69	9.068.113,48
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	642.036,04	674.194,84	791.121,09	1.050.861,00	1.272.455,45
5. BANGUNAN	763.196,78	889.736,07	1.017.146,28	1.209.636,13	1.411.627,90
C. TERSIER	8.578.638,85	9.639.806,10	10.740.818,42	12.607.433,46	14.491.938,37
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5.858.639,46	6.582.826,33	7.476.102,89	8.841.514,77	10.154.176,80
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.014.110,28	1.141.465,64	1.192.355,21	1.458.007,19	1.723.464,09
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	525.562,07	604.137,97	658.439,23	741.121,56	823.440,05
9. JASA - JASA	1.180.327,04	1.311.376,16	1.413.921,09	1.566.789,94	1.790.857,43
PDRB KOTA DEPOK	16.144.726,24	17.913.312,90	20.001.733,26	23.261.048,75	26.734.548,37

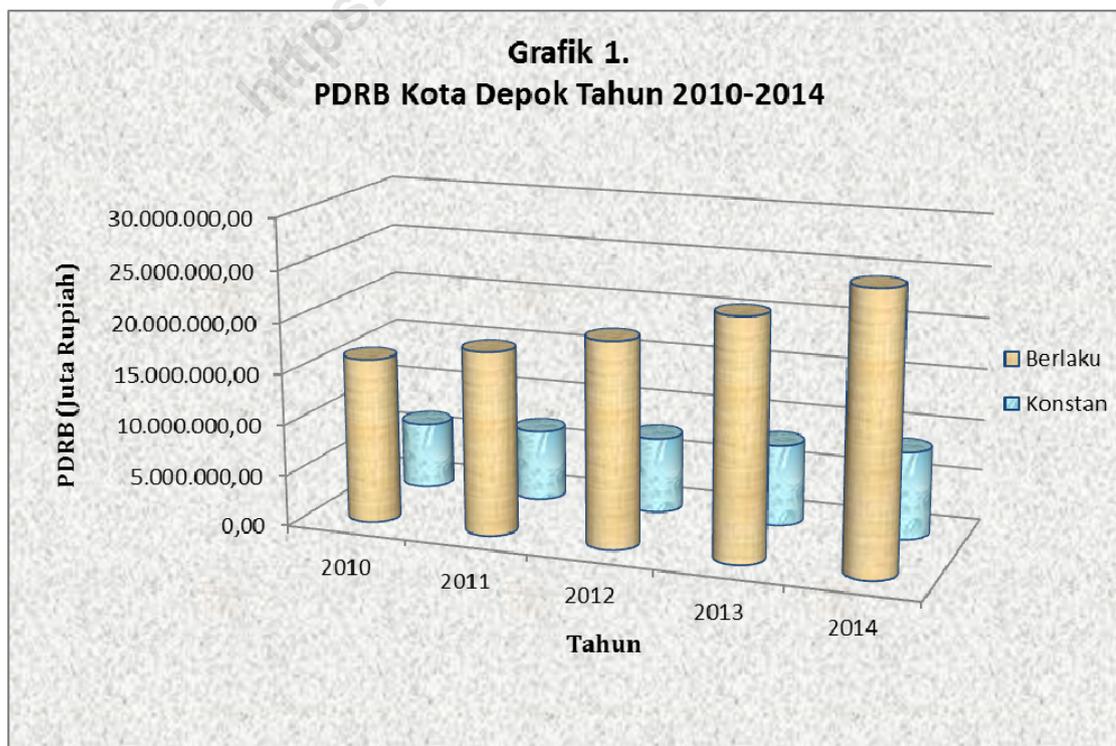
*) Angka Sementara

**TABEL B PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DEPOK
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009-2013 (Juta Rp)**

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014*)
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A. PRIMER	186.945,98	192.028,72	190.532,79	191.498,19	194.444,85
1. PERTANIAN	186.945,98	192.028,72	190.532,79	191.498,19	194.444,85
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SEKUNDER	3.217.727,37	3.382.686,61	3.673.043,15	3.961.167,90	4.274.160,23
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.607.666,08	2.706.085,56	2.915.294,31	3.103.803,98	3.320.028,53
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	194.125,39	201.477,47	231.116,38	268.372,10	298.167,08
5. BANGUNAN	415.935,90	475.123,58	526.632,46	588.991,81	655.964,62
C. TERSIER	3.114.652,86	3.373.787,43	3.582.085,95	3.807.871,85	4.056.524,08
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	2.030.889,31	2.204.514,80	2.364.185,33	2.527.971,78	2.697.510,96
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	337.803,37	365.389,73	378.867,81	389.911,63	403.424,12
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	251.443,22	281.637,44	297.914,63	319.868,70	342.387,49
9. JASA - JASA	494.516,96	522.245,46	541.118,18	570.119,74	613.201,51
PDRB KOTA DEPOK	6.519.326,21	6.948.502,76	7.445.661,89	7.960.537,94	8.525.129,16

*) Angka Sementara

Keadaan PDRB Kota Depok Tahun 2010-2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 dapat dilihat pada Grafik 1.



4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB suatu daerah merupakan indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.

Secara umum, pada tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku sebesar 14,93 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan PDRB Kota Depok (*Baca: Laju Pertumbuhan Ekonomi*) naik sebesar 7,09 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel C.

**TABEL C. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA DEPOK
TAHUN 2010-2014**

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014*)
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A. PRIMER	1,94	2,72	-0,78	0,51	1,54
1. PERTANIAN	3,99	2,72	-0,78	0,51	1,54
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	-	-	-	-	-
B. SEKUNDER	6,91	5,13	8,58	7,84	7,90
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	6,57	3,77	7,73	6,47	6,97
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	4,51	3,79	14,71	16,12	11,10
5. BANGUNAN	7,83	14,23	10,84	11,84	11,37
C. TERSIER	6,19	8,32	6,17	6,30	6,53
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5,76	8,55	7,24	6,93	6,71
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	6,01	8,17	3,69	2,91	3,47
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	4,63	12,01	5,78	7,37	7,04
9. JASA - JASA	7,37	5,61	3,61	5,36	7,56
PDRB KOTA DEPOK	6,22	6,58	7,15	6,92	7,09
PDRB PROVINSI JAWA BARAT	6,20	6,51	6,28	6,06	5,07

*) Angka Sementara

Dilihat dari kelompok sektor, pada tahun 2014 ini seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan terkecil. Bahkan jika dilihat lebih dalam pada sub sektor pertanian ini, sub sektor tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan mengalami pertumbuhan yang negatif.

Sedangkan pertumbuhan kelompok Tersier mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,53 persen pada tahun 2014 dari 6,30 persen pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan secara melambat terjadi empat sektor, yaitu sektor Listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa.

Laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor menunjukkan bahwa sektor bangunan mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang paling besar. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Depok sedang sangat pesat.

Pada Grafik 2 dapat dilihat Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2010-2014 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.



4.3. Struktur Ekonomi

Sistem ekonomi suatu wilayah merupakan bagian dari supra sistem kehidupan, berkaitan erat dengan sistem sosial lain yang tumbuh dan berlangsung di dalam

masyarakat. Sistem ekonomi biasanya sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) yang ada dan berbeda-beda di tiap wilayah. Potensi SDA tidak lepas dari pengelolaan oleh manusia sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) menjadikan sangat beragam kegiatan perekonomian yang pada akhirnya memberikan warna tersendiri pada sistem ekonomi di suatu wilayah. Sistem ekonomi yang terbentuk pada suatu wilayah dapat memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian di wilayah tersebut. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral PDRB.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah bersangkutan. Tabel D memperlihatkan distribusi persentase PDRB Kota Depok Tahun 2009-2013 atas dasar harga berlaku menurut kelompok sektor primer, sekunder dan tersier.

Untuk kelompok sektor Primer selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 2,21 persen menjadi 1,83 persen dengan perubahan sebesar minus 16,98 persen. Penurunan kontribusi kelompok sektor ini karena beralih ke sektor tersier dan sekunder.

Pada kelompok sektor Sekunder menurun peranannya selama kurun waktu 2010-2014 yaitu dari 44,65 persen menjadi 43,96 persen dengan penurunan sebesar 1,56 persen. Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan sektor Industri Pengolahan dari 35,95 persen menjadi 33,92 persen, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mengalami peningkatan dari 3,98 persen menjadi 4,76 persen, dan sektor Bangunan/Konstruksi mengalami peningkatan dari 4,73 persen menjadi 5,28 persen.

Pada kelompok Tersier selama kurun waktu 2010-2014 terjadi peningkatan peranan yaitu dari 53,14 persen menjadi 54,21 persen dengan perubahan 2,02 persen. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran peranannya meningkat dari 36,29 persen menjadi 37,98 persen, sedangkan sektor Angkutan dan Komunikasi sedikit meningkat dari 6,28 persen menjadi 6,45 persen, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

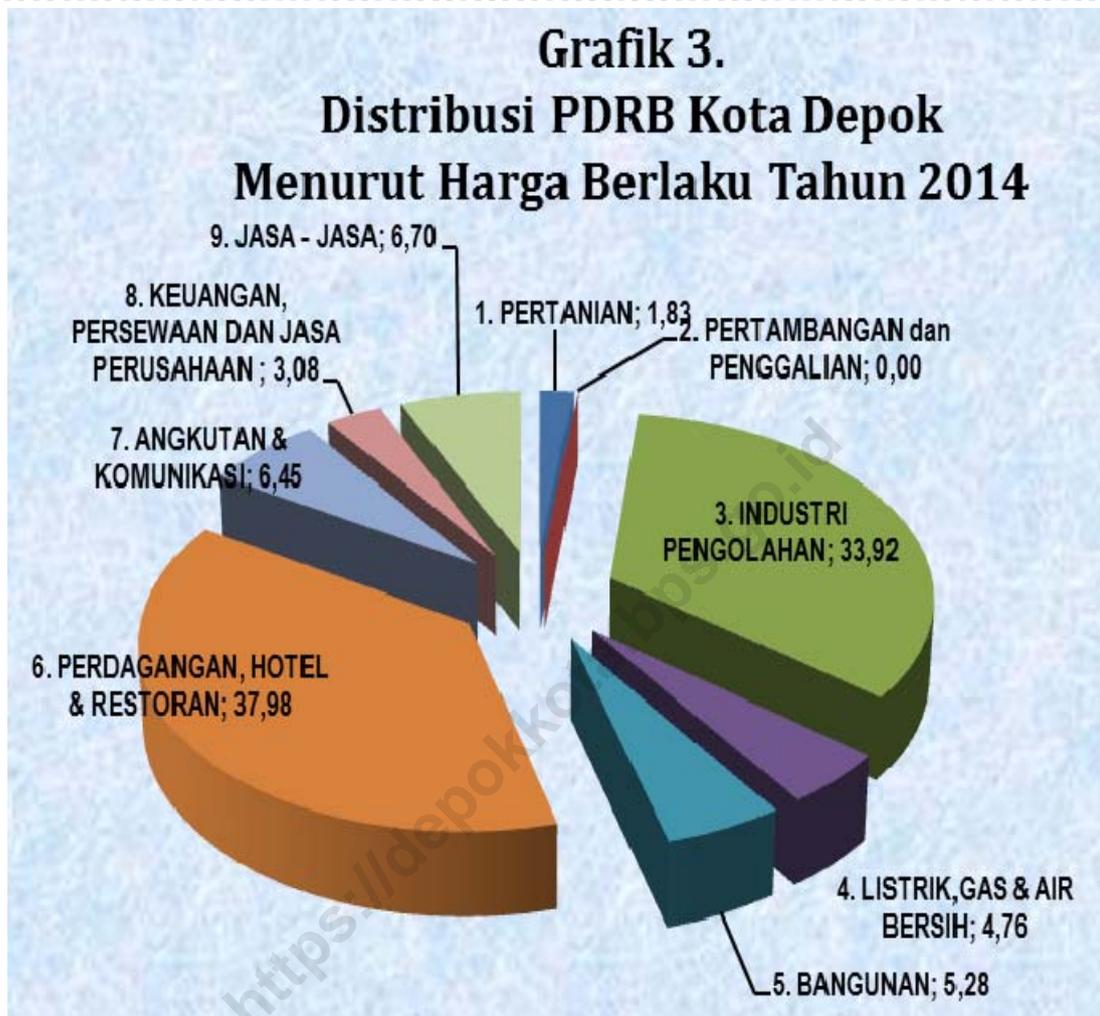
turun dari 3,26 persen menjadi 3,08 persen, dan sektor Jasa-jasa menurun dari 7,31 persen menjadi 6,70 persen.

**TABEL D. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA DEPOK ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2014 (persen)**

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014*)
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A. PRIMER	2,21	2,09	1,96	1,93	1,83
1. PERTANIAN	2,21	2,09	1,96	1,93	1,83
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SEKUNDER	44,65	44,09	44,34	43,87	43,96
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	35,95	35,36	35,30	34,16	33,92
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	3,98	3,76	3,96	4,52	4,76
5. BANGUNAN	4,73	4,97	5,09	5,20	5,28
C. TERSIER	53,14	53,81	53,70	54,20	54,21
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	36,29	36,75	37,38	38,01	37,98
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	6,28	6,37	5,96	6,27	6,45
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	3,26	3,37	3,29	3,19	3,08
9. JASA - JASA	7,31	7,32	7,07	6,74	6,70
PDRB KOTA DEPOK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

Grafik 3 memperlihatkan distribusi persentase PDRB Kota Depok Tahun 2014 atas dasar harga berlaku menurut sektor.



4.4. Indeks Harga Implisit

Indeks Harga Implisit adalah suatu indeks harga yang menggambarkan perbandingan antara nilai produk atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan, sedangkan perubahan Indeks Harga Implisit mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu periode.

Perubahan Indeks Harga Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan Indeks Harga Implisit sudah mewakili semua jenis harga yaitu harga konsumen, harga produsen,

harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor.

Dari Tabel E di bawah diperoleh bahwa pada tahun 2014 di Kota Depok telah terjadi inflasi (perubahan Indeks Harga Implisit) berbagai jenis produk sebesar 7,32 persen. Sektor yang mengalami inflasi terbesar adalah sektor Angkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 14,25 persen, sedangkan yang terendah adalah sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 3,80 persen.

**TABEL E. INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT SEKTOR
KOTA DEPOK TAHUN 2009-2013**

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013*)
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A. PRIMER	190,81	195,29	206,01	233,89	190,81
1. PERTANIAN	190,81	195,29	206,01	233,89	190,81
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	-	-	-	-	-
B. SEKUNDER	224,05	233,50	241,45	257,64	224,05
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	222,58	234,09	242,18	255,98	222,58
4. LISTRIK,GAS & AIR BERSIH	330,73	334,63	342,30	391,57	330,73
5. BANGUNAN	183,49	187,26	193,14	205,37	183,49
C. TERSIER	275,43	285,73	299,85	331,09	275,43
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	288,48	298,61	316,22	349,75	288,48
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	300,21	312,40	314,72	373,93	300,21
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	209,02	214,51	221,02	231,70	209,02
9. JASA - JASA	238,68	251,10	261,30	274,82	238,68
PDRB KOTA DEPOK	247,64	257,80	268,64	292,20	247,64
Inflasi Depok	5,57	4,10	4,20	8,77	5,57
PDRB PROVINSI JAWA BARAT	227,37	239,46	250,93	259,84	
Inflasi Jawa Barat	4,55	5,32	4,79	3,55	

Untuk kelompok sektor, inflasi terendah adalah sektor sekunder sebesar 6,72 persen, kedua sektor Primer sebesar 7,83 persen, sedangkan yang tertinggi sektor Tersier sebesar 7,90 persen.

Perkembangan Inflasi Kota Depok Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Grafik 4.



4.5. PDRB Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka yang dapat disajikan hanya PDRB perkapita.

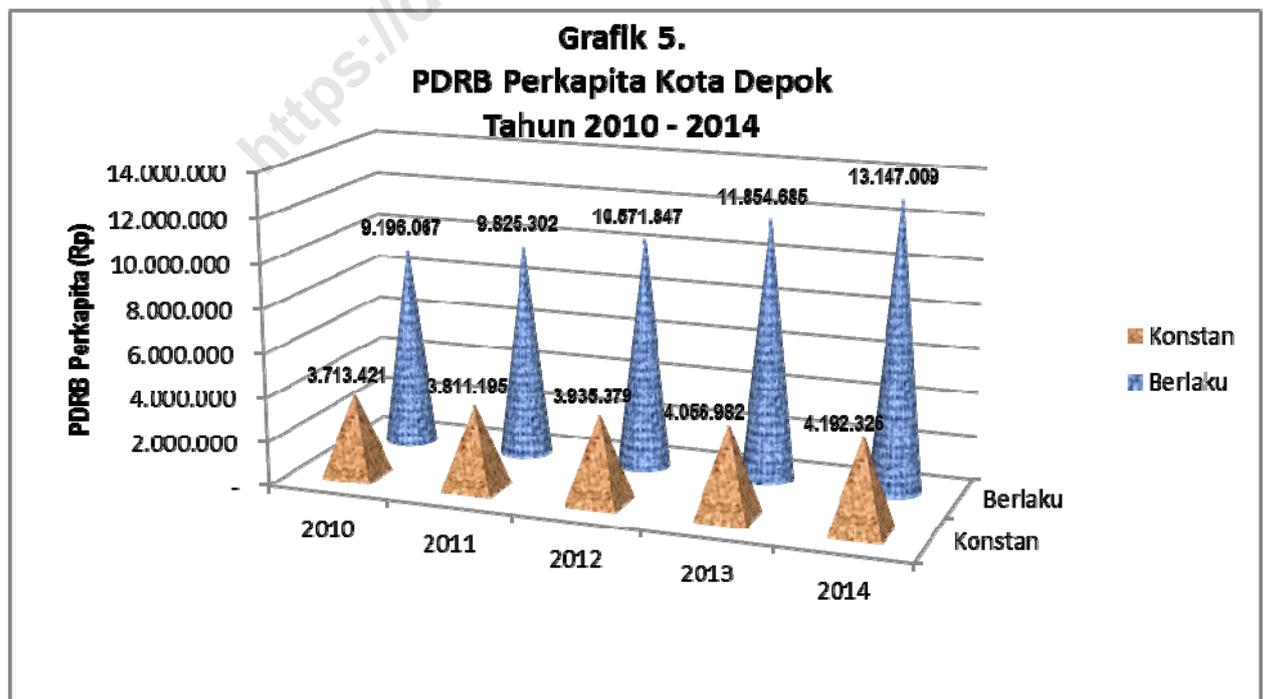
Nilai PDRB perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun. Nilai ini menunjukkan rata-rata banyaknya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk daerah tersebut. Nilai ini sangat tergantung dari jumlah penduduk pertengahan tahun, artinya jika jumlah penduduk daerah tersebut banyak, maka PDRB perkapita yang

menjadi kecil, sebaliknya jika daerah tersebut berpenduduk sedikit, maka PDRB perkapita menjadi besar.

PDRB perkapita Kota Depok atas dasar harga berlaku menunjukkan kenaikan dari Rp 11.854.685,- pada tahun 2013 menjadi Rp 13.147.009,- pada tahun 2014 atau meningkat 10,90 persen.

Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita di atas masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Depok secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil bisa digunakan PDRB perkapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan. PDRB perkapita Kota Depok yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dari Rp 4.056.982,- pada tahun 2013 menjadi Rp 4.192.326,- pada tahun 2014 atau naik 3,34 persen (Grafik 5).



KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2014 nilai PDRB Kota Depok sebesar Rp 26.734.548,37 juta, mengalami peningkatan sebesar 14,93 % bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.
- b. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, pada tahun 2014 nilai PDRB Kota Depok sebesar Rp 8.525.129,16 juta, mengalami peningkatan sebesar 7,09 % bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.
- c. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2014 sebesar 7,09 %, lebih tinggi 2,02 point bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang besarnya 5,07 %.
- d. Selama kurun waktu 2010 s.d 2014, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Depok adalah sebesar 6,79 % per tahun. Dan selama lima tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Kota Depok selalu berada di atas Jawa Barat.
- e. Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 2,21 % (2010) menjadi 1,83 % (2014), dengan perubahan penurunan sebesar 16,98 %.
- f. Peranan kelompok sektor sekunder dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 44,65 % (2010) menjadi 43,96 % (2014). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kota Depok.
- g. Peranan kelompok sektor tersier dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 meningkat dari 53,14 % (2010) menjadi 54,21 % (2014). Sektor yang peningkatan peran dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana peranannya naik dari 36,29 % (2009) menjadi 37,98 % (2014).

- h. Inflasi Kota Depok pada Tahun 2014 yang dihitung dengan pendekatan PDRB adalah sebesar 7,32 %. Inflasi pada sektor primer sebesar 7,83 %, sektor tersier 6,72 % dan sektor sekunder 7,90 %.
- i. PDRB per Kapita Kota Depok pada Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 13.147.009,-, mengalami peningkatan sebesar 10,90 % jika dibandingkan tahun 2013. PDRB per kapita ini tidak menggambarkan secara utuh pendapatan per kapita Kota Depok, karena besarnya pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar serta besarnya pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir masuk belum dapat dihitung, sedangkan penduduk Kota Depok yang melakukan aktivitas ekonomi di luar Kota Depok sangat banyak.
- j. Daya beli masyarakat secara riil meningkat sebesar 3,34 %.

<https://depokkota.bp.go.id>

5.2. Saran

- a. Pemerintah Kota Depok sebaiknya memberikan konsentrasi lebih terhadap sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Trend lima tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan selalu mengalami sedikit penurunan setiap tahunnya, sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran selalu mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya.
- b. Industri pengolahan yang cukup prospektif untuk dikembangkan di Kota Depok adalah sub sektor tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, serta sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau. Kedua sub sektor ini sifatnya juga industri yang *labour intensive*, sehingga penyerapan tenaga kerjanya juga cukup besar. Gangguan negatif terhadap dua sub sektor ini dapat berdampak buruk terhadap perekonomian Kota Depok.
- c. Sub Sektor Perdagangan Besar dan eceran yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam perekonomian Kota Depok. Namun karena sub sektor ini sebagian besar dijalankan oleh masyarakat Kota Depok secara informal, sehingga pemerintah sulit untuk melakukan intervensi di dalamnya. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menjamin bahwa UMKM yang bergerak pada sub sektor perdagangan ini tidak dirugikan oleh para pedagang modal besar maupun para retailer.

LAMPIRAN

<https://depokkota.bps.go.id>

TABEL 1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA DEPOK
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2014 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. PERTANIAN	356.720,80	375.014,31	392.520,48	447.897,48	490.413,17
a. Tanaman Bahan Makanan	68.428,16	72.068,54	73.811,46	65.352,67	67.844,68
b. Tanaman Perkebunan	37,20	42,92	43,46	44,88	48,17
c. Peternakan	237.555,69	247.939,25	257.651,73	307.785,09	335.202,35
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,00		0,00
e. Perikanan	50.699,75	54.963,60	61.013,83	74.714,85	87.317,97
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Minyak dan Gas Bumi					
- Pertambangan Tanpa Migas					
- Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5.804.133,77	6.334.561,58	7.060.126,99	7.945.220,69	9.068.113,48
a. INDUSTRI MIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pengilangan Minyak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	5.804.133,77	6.334.561,58	7.060.126,99	7.945.220,69	9.068.113,48
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	642.036,04	674.194,84	791.121,09	1.050.861,00	1.272.455,45
- Listrik	616.810,00	646.009,78	762.291,55	1.017.278,07	1.232.631,76
- Gas Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Air Bersih	25.226,04	28.185,06	28.829,54	33.582,93	39.823,69
5. BANGUNAN	763.196,78	889.736,07	1.017.146,28	1.209.636,13	1.411.627,90
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5.858.639,46	6.582.826,33	7.476.102,89	8.841.514,77	10.154.176,80
- Perdagangan Besar & Eceran	4.990.374,45	5.591.215,53	6.316.867,32	7.505.284,84	8.709.793,04
- Hotel	13.890,86	15.317,45	16.031,30	17.834,18	19.317,81
- Restoran	854.374,15	976.293,35	1.143.204,27	1.318.395,75	1.425.065,95
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.014.110,28	1.141.465,64	1.192.355,21	1.458.007,19	1.723.464,09
a. P e n g a n g k u t a n	933.424,19	1.051.629,75	1.096.339,09	1.355.286,41	1.613.159,87
1). Angkutan Rel	25.760,87	28.731,09	35.699,87	35.901,22	36.827,55
2). Angkutan Jalan raya	832.143,39	942.152,75	975.665,17	1.226.876,51	1.477.013,94
3). Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4). Angkutan sungai, danau dan penyebranga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6). Jasa Penunjang Angkutan	75.519,93	80.745,91	84.974,05	92.508,68	99.318,37
b. K o m u n i k a s i	80.686,09	89.835,89	96.016,12	102.720,78	110.304,22
1). POS dan Komunikasi	80.686,09	89.835,89	96.016,12	102.720,78	110.304,22
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	525.562,07	604.137,97	658.439,23	741.121,56	823.440,05
a. B a n k	40.113,54	47.281,83	53.239,63	61.218,65	73.750,75
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1.589,75	1.818,20	1.934,54	2.233,76	2.708,63
c. Sewa Bangunan	427.474,09	489.372,33	534.025,89	605.512,73	667.666,07
d. Jasa Perusahaan	56.384,69	65.665,61	69.239,17	72.156,42	79.314,60
9. JASA - JASA	1.180.327,04	1.311.376,16	1.413.921,09	1.566.789,94	1.790.857,43
a. Pemerintahan Umum	623.452,49	686.364,46	761.687,84	867.814,47	1.007.778,06
1) Adm. Pemerintah & Pertahanan	387.985,66	427.327,40	467.749,82	545.243,36	632.514,76
2) Jasa Pemerintah lainnya	235.466,83	259.037,06	293.938,02	322.571,11	375.263,30
b. S w a s t a	556.874,55	625.011,70	652.233,25	698.975,47	783.079,37
1). Sosial Kemasyarakatan	188.540,05	212.182,97	220.510,73	228.622,22	259.517,84
2). Hiburan dan Rekreasi	8.715,27	9.911,35	10.389,92	11.100,72	12.020,81
3). Perorangan dan Rumah tangga	359.619,23	402.917,38	421.332,60	459.252,53	511.540,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	16.144.726,24	17.913.312,90	20.001.733,26	23.261.048,75	26.734.548,37

*) Angka Sementara

**TABEL 1.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA DEPOK
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2010-2014 (Juta Rp)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. PERTANIAN	186.945,98	192.028,72	190.532,79	191.498,19	194.444,85
a. Tanaman Bahan Makanan	34.340,90	35.715,52	34.644,05	27.334,16	25.683,91
b. Tanaman Perkebunan	35,45	34,64	33,60	30,16	29,87
c. Peternakan	130.265,74	133.491,12	132.156,21	137.875,93	140.522,78
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Perikanan	22.303,89	22.787,44	23.698,93	26.257,94	28.208,29
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Minyak dan Gas Bumi					
- Pertambangan Tanpa Migas					
- Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.607.666,08	2.706.085,56	2.915.294,31	3.103.803,98	3.320.028,53
a. INDUSTRI MIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pengilangan Minyak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	2.607.666,08	2.706.085,56	2.915.294,31	3.103.803,98	3.320.028,53
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	194.125,39	201.477,47	231.116,38	268.372,10	298.167,08
- Listrik	177.868,59	183.879,36	213.300,05	249.932,20	278.486,63
- Gas Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Air Bersih	16.256,80	17.598,11	17.816,32	18.439,89	19.680,46
5. BANGUNAN	415.935,90	475.123,58	526.632,46	588.991,81	655.964,62
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORA	2.030.889,31	2.204.514,80	2.364.185,33	2.527.971,78	2.697.510,96
- Perdagangan Besar & Eceran	1.675.740,87	1.816.744,82	1.958.181,99	2.102.259,54	2.256.161,26
- Hotel	8.984,80	9.551,58	9.805,41	10.338,33	10.624,60
- Restoran	346.163,64	378.218,40	396.197,93	415.373,91	430.725,10
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	337.803,37	365.389,73	378.867,81	389.911,63	403.424,12
a. P e n g a n g k u t a n	306.917,43	331.638,81	343.069,79	351.593,43	362.158,85
1). Angkutan Rel	14.817,44	15.709,45	19.352,61	19.350,67	19.745,08
2). Angkutan Jalan raya	247.725,33	269.691,09	275.805,31	282.915,57	291.667,29
3). Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4). Angkutan sungai, danau dan penyebra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6). Jasa Penunjang Angkutan	44.374,66	46.238,27	47.911,87	49.327,19	50.746,48
b. K o m u n i k a s i	30.885,94	33.750,92	35.798,02	38.318,20	41.265,27
1). POS dan Komunikasi	30.885,94	33.750,92	35.798,02	38.318,20	41.265,27
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	251.443,22	281.637,44	297.914,63	319.868,70	342.387,49
a. B a n k	20.686,67	23.733,81	25.320,98	28.449,13	31.829,87
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	887,40	982,26	983,54	1.115,33	1.254,22
c. Sewa Bangunan	201.758,37	224.799,18	238.270,05	255.715,36	273.399,47
d. Jasa Perusahaan	28.110,78	32.122,19	33.340,06	34.588,87	35.903,94
9. JASA - JASA	494.516,96	522.245,46	541.118,18	570.119,74	613.201,51
a. Pemerintahan Umum	238.311,96	244.402,32	258.593,27	278.863,36	302.284,76
1) Adm. Pemerintah & Pertahanan	148.258,34	152.256,15	158.754,91	170.626,60	184.749,97
2) Jasa Pemerintah lainnya	90.053,62	92.146,17	99.838,36	108.236,76	117.534,79
b. S w a s t a	256.205,00	277.843,14	282.524,91	291.256,38	310.916,75
1). Sosial Masyarakat	75.594,26	81.833,05	83.422,43	85.374,52	89.548,22
2). Hiburan dan Rekreasi	5.329,58	5.929,16	6.003,58	6.217,60	6.578,53
3). Perorangan dan Rumah tangga	175.281,16	190.080,93	193.098,90	199.664,26	214.789,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.519.326,21	6.948.502,76	7.445.661,89	7.960.537,94	8.525.129,16

*) Angka Sementara

TABEL 2.1 INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA DEPOK ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2014 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. PERTANIAN	7,10	5,13	4,67	14,11	9,49
a. Tanaman Bahan Makanan	12,41	5,32	2,42	-11,46	3,81
b. Tanaman Perkebunan	-52,19	15,38	1,26	3,26	7,34
c. Peternakan	5,41	4,37	3,92	19,46	8,91
d. Kehutanan	-	-	-	-	-
e. Perikanan	9,15	8,41	11,01	22,46	16,87
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	-	-	-	-	-
- Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	-	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	11,12	9,14	11,45	12,54	14,13
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	11,12	9,14	11,45	12,54	14,13
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	7,88	5,01	17,34	32,83	21,09
- Listrik	7,88	4,73	18,00	33,45	21,17
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	8,03	11,73	2,29	16,49	18,58
5. BANGUNAN	10,56	16,58	14,32	18,92	16,70
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	14,97	12,36	13,57	18,26	14,85
- Perdagangan Besar & Eceran	14,47	12,04	12,98	18,81	16,05
- Hotel	8,25	10,27	4,66	11,25	8,32
- Restoran	18,01	14,27	17,10	15,32	8,09
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	11,18	12,56	4,46	22,28	18,21
a. P e n g a n g k u t a n	10,40	12,66	4,25	23,62	19,03
b. K o m u n i k a s i	21,93	11,34	6,88	6,98	7,38
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PE	9,18	14,95	8,99	12,56	11,11
a. B a n k	10,10	17,87	12,60	14,99	20,47
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	12,73	14,37	6,40	15,47	21,26
c. Sewa Bangunan	9,17	14,48	9,12	13,39	10,26
d. Jasa Perusahaan	8,53	16,46	5,44	4,21	9,92
9. JASA - JASA	11,03	11,10	7,82	10,81	14,30
a. Pemerintahan Umum	10,95	10,09	10,97	13,93	16,13
b. S w a s t a	11,12	12,24	4,36	7,17	12,03
1). Sosial Kemasyarakatan	12,29	12,54	3,92	3,68	13,51
2). Hiburan dan Rekreasi	8,28	13,72	4,83	6,84	8,29
3). Perorangan dan Rumah tangga	10,55	12,04	4,57	9,00	11,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12,13	10,95	11,66	16,30	14,93

*) Angka Sementara

TABEL 2.2 INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA DEPOK ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2010-2014 (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. PERTANIAN	3,99	2,72	-0,78	0,51	1,54
a. Tanaman Bahan Makanan	8,27	4,00	-3,00	-21,10	-6,04
b. Tanaman Perkebunan	-43,74	-2,27	-3,00	-10,25	-0,95
c. Peternakan	2,41	2,48	-1,00	4,33	1,92
d. Kehutanan	-	-	-	-	-
e. Perikanan	7,34	2,17	4,00	10,80	7,43
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	-	-	-	-	-
- Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	-	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	6,57	3,77	7,73	6,47	6,97
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	6,57	3,77	7,73	6,47	6,97
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	4,51	3,79	14,71	16,12	11,10
- Listrik	4,32	3,38	16,00	17,17	11,42
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	6,69	8,25	1,24	3,50	6,73
5. BANGUNAN	7,83	14,23	10,84	11,84	11,37
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5,76	8,55	7,24	6,93	6,71
- Perdagangan Besar & Eceran	4,93	8,41	7,79	7,36	7,32
- Hotel	7,90	6,31	2,66	5,43	2,77
- Restoran	9,74	9,26	4,75	4,84	3,70
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	6,01	8,17	3,69	2,91	3,47
a. P e n g a n g k u t a n	5,69	8,05	3,45	2,48	3,01
b. K o m u n i k a s i	9,38	9,28	6,07	7,04	7,69
1). POS dan Komunikasi	9,38	9,28	6,07	7,04	7,69
2). Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PE	4,63	12,01	5,78	7,37	7,04
a. B a n k	3,91	14,73	6,69	12,35	11,88
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	3,36	10,69	0,13	13,40	12,45
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
c. Sewa Bangunan	4,49	11,42	5,99	7,32	6,92
d. Jasa Perusahaan	6,25	14,27	3,79	3,75	3,80
9. JASA - JASA	7,37	5,61	3,61	5,36	7,56
a. Pemerintahan Umum	8,14	2,56	5,81	7,84	8,40
b. S w a s t a	6,62	8,45	1,69	3,09	6,75
1). Sosial Kemasyarakatan	5,04	8,25	1,94	2,34	4,89
2). Hiburan dan Rekreasi	5,24	11,25	1,26	3,56	5,80
3). Perorangan dan Rumah tangga	7,40	8,44	1,59	3,40	7,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,22	6,58	7,15	6,92	7,09

*) Angka Sementara

TABEL 3.1 DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA DEPOK ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2014 (Juta Rp) (Persen)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. PERTANIAN	2,21	2,09	1,96	1,93	1,83
a. Tanaman Bahan Makanan	0,42	0,40	0,37	0,28	0,25
b. Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Peternakan	1,47	1,38	1,29	1,32	1,25
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Perikanan	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pertambangan Tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	35,95	35,36	35,30	34,16	33,92
a. INDUSTRI MIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pengilangan Minyak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	35,95	35,36	35,30	34,16	33,92
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	3,98	3,76	3,96	4,52	4,76
- Listrik	3,82	3,61	3,81	4,37	4,61
- Gas Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Air Bersih	0,16	0,16	0,14	0,14	0,15
5. BANGUNAN	4,73	4,97	5,09	5,20	5,28
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	36,29	36,75	37,38	38,01	37,98
- Perdagangan Besar & Eceran	30,91	31,21	31,58	32,27	32,58
- Hotel	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
- Restoran	5,29	5,45	5,72	5,67	5,33
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	6,28	6,37	5,96	6,27	6,45
a. P e n g a n g k u t a n	5,78	5,87	5,48	5,83	6,03
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PE	3,26	3,37	3,29	3,19	3,08
a. B a n k	0,25	0,26	0,27	0,26	0,28
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
c. Sewa Bangunan	2,65	2,73	2,67	2,60	2,50
d. Jasa Perusahaan	0,35	0,37	0,35	0,31	0,30
9. JASA - JASA	7,31	7,32	7,07	6,74	6,70
a. Pemerintahan Umum	3,86	3,83	3,81	3,73	3,77
b. S w a s t a	3,45	3,49	3,26	3,00	2,93
1). Sosial Kemasyarakatan	1,17	1,18	1,10	0,98	0,97
2). Hiburan dan Rekreasi	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04
3). Perorangan dan Rumah tangga	2,23	2,25	2,11	1,97	1,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

TABEL 3.2 DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA DEPOK ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2010-2014 (Juta Rp) (Persen)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. PERTANIAN	2,87	2,76	2,56	2,41	2,28
a. Tanaman Bahan Makanan	0,53	0,51	0,47	0,34	0,30
b. Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Peternakan	2,00	1,92	1,77	1,73	1,65
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Perikanan	0,34	0,33	0,32	0,33	0,33
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pertambangan Tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	40,00	38,94	39,15	38,99	38,94
a. INDUSTRI MIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pengilangan Minyak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	40,00	38,94	39,15	38,99	38,94
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	2,98	2,90	3,10	3,37	3,50
- Listrik	2,73	2,65	2,86	3,14	3,27
- Gas Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Air Bersih	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23
5. BANGUNAN	6,38	6,84	7,07	7,40	7,69
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	31,15	31,73	31,75	31,76	31,64
- Perdagangan Besar & Eceran	25,70	26,15	26,30	26,41	26,46
- Hotel	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
- Restoran	5,31	5,44	5,32	5,22	5,05
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,18	5,26	5,09	4,90	4,73
a. Pengangkutan	4,71	4,77	4,61	4,42	4,25
b. Komunikasi	0,47	0,49	0,48	0,48	0,48
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASAJASA	3,86	4,05	4,00	4,02	4,02
a. Bank	0,32	0,34	0,34	0,36	0,37
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
c. Sewa Bangunan	3,09	3,24	3,20	3,21	3,21
d. Jasa Perusahaan	0,43	0,46	0,45	0,43	0,42
9. JASAJASA	7,59	7,52	7,27	7,16	7,19
a. Pemerintahan Umum	3,66	3,52	3,47	3,50	3,55
b. Swastajasa	3,93	4,00	3,79	3,66	3,65
1). Sosial Kemasyarakatan	1,16	1,18	1,12	1,07	1,05
2). Hiburan dan Rekreasi	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08
3). Perorangan dan Rumah tangga	2,69	2,74	2,59	2,51	2,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

TABEL 4.0 INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA DEPOK TAHUN 2010- 2014

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. PERTANIAN	190,81	195,29	206,01	233,89	252,21
a. Tanaman Bahan Makanan	199,26	201,78	213,06	239,09	264,15
b. Tanaman Perkebunan	104,95	123,90	129,34	148,81	161,27
c. Peternakan	182,36	185,73	194,96	223,23	238,54
d. Kehutanan	-	-	-	-	-
e. Perikanan	227,31	241,20	257,45	284,54	309,55
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	-	-	-	-	-
- Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	-	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	222,58	234,09	242,18	255,98	273,13
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	222,58	234,09	242,18	255,98	273,13
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	330,73	334,63	342,30	391,57	426,76
- Listrik	346,78	351,32	357,38	407,02	442,62
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	155,17	160,16	161,82	182,12	202,35
5. BANGUNAN	183,49	187,26	193,14	205,37	215,20
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	288,48	298,61	316,22	349,75	376,43
- Perdagangan Besar & Eceran	297,80	307,76	322,59	357,01	386,04
- Hotel	154,60	160,37	163,49	172,51	181,82
- Restoran	246,81	258,13	288,54	317,40	330,85
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	300,21	312,40	314,72	373,93	427,21
a. P e n g a n g k u t a n	304,13	317,10	319,57	385,47	445,43
1). Angkutan Rel	173,86	182,89	184,47	185,53	186,52
2). Angkutan Jalan raya	335,91	349,35	353,75	433,65	506,40
3). Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4). Angkutan sungai, danau dan penyebranga	-	-	-	-	-
5). Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	170,19	174,63	177,35	187,54	195,71
b. K o m u n i k a s i	261,24	266,17	268,22	268,07	267,31
1). POS dan Komunikasi	261,24	266,17	268,22	268,07	267,31
2). Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PE	209,02	214,51	221,02	231,70	240,50
a. B a n k	193,91	199,22	210,26	215,19	231,70
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	179,15	185,10	196,69	200,28	215,96
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
c. Sewa Bangunan	211,87	217,69	224,13	236,79	244,21
d. Jasa Perusahaan	200,58	204,42	207,68	208,61	220,91
9. JASA - JASA	238,68	251,10	261,30	274,82	292,05
a. Pemerintahan Umum	261,61	280,83	294,55	311,20	333,39
1) Adm. Pemerintah & Pertahanan	261,70	280,66	294,64	319,55	342,36
2) Jasa Pemerintah lainnya	261,47	281,12	294,41	298,02	319,28
b. S w a s t a	217,36	224,95	230,86	239,99	251,86
1). Sosial Masyarakatan	249,41	259,29	264,33	267,79	289,81
2). Hiburan dan Rekreasi	163,53	167,16	173,06	178,54	182,73
3). Perorangan dan Rumah tangga	205,17	211,97	218,20	230,01	238,16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	247,64	257,80	268,64	292,20	313,60

*) Angka Sementara

TABEL 5.0 INFLASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA DEPOK TAHUN 2010- 2014

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. PERTANIAN	2,98	2,35	5,49	13,53	7,83
a. Tanaman Bahan Makanan	3,83	1,27	5,59	12,22	10,48
b. Tanaman Perkebunan	-15,02	18,06	4,39	15,05	8,37
c. Peternakan	2,93	1,85	4,97	14,50	6,86
d. Kehutanan	-	-	-	-	-
e. Perikanan	1,69	6,11	6,74	10,52	8,79
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	-	-	-	-	-
- Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
- Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-	-
- Penggalian	-	-	-	-	-
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,27	5,17	3,46	5,70	6,70
a. INDUSTRI MIGAS	-	-	-	-	-
- Pengilangan Minyak	-	-	-	-	-
- Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	4,27	5,17	3,46	5,70	6,70
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	3,23	1,18	2,29	14,39	8,99
- Listrik	3,41	1,31	1,72	13,89	8,75
- Gas Kota	-	-	-	-	-
- Air Bersih	1,26	3,21	1,03	12,55	11,11
5. BANGUNAN	2,53	2,06	3,14	6,33	4,78
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	8,71	3,51	5,90	10,60	7,63
- Perdagangan Besar & Eceran	9,09	3,34	4,82	10,67	8,13
- Hotel	0,32	3,73	1,95	5,51	5,40
- Restoran	7,54	4,59	11,78	10,00	4,24
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,88	4,06	0,74	18,82	14,25
a. Pengangkutan	4,46	4,27	0,78	20,62	15,55
b. Komunikasi	11,47	1,89	0,77	-0,05	-0,29
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASAJASA	4,35	2,63	3,03	4,83	3,80
a. Bank	5,96	2,74	5,54	2,34	7,68
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	9,07	3,32	6,26	1,82	7,83
c. Sewa Bangunan	4,48	2,75	2,96	5,65	3,13
d. Jasa Perusahaan	2,14	1,92	1,59	0,45	5,89
9. JASAJASA - JASAJASA	3,41	5,20	4,06	5,17	6,27
a. Pemerintahan Umum	2,60	7,35	4,88	5,65	7,13
b. Swastajasa	4,22	3,49	2,63	3,95	4,95
1). Sosial Kemasyarakatan	6,90	3,96	1,94	1,31	8,22
2). Hiburan dan Rekreasi	2,89	2,22	3,53	3,16	2,35
3). Perorangan dan Rumah tangga	2,93	3,32	2,94	5,42	3,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,57	4,10	4,20	8,77	7,32

*) Angka Sementara

**TABEL 6.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT SEKTOR KOTA DEPOK
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2014 (Juta Rp)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Primer	356.720,80	375.014,31	392.520,48	447.897,48	490.413,17
Sekunder	7.209.366,59	7.898.492,49	8.868.394,36	10.205.717,81	11.752.196,83
Tersier	8.578.638,85	9.639.806,10	10.740.818,42	12.607.433,46	14.491.938,37
PDRB	16.144.726,24	17.913.312,90	20.001.733,26	23.261.048,75	26.734.548,37

*) Angka Sementara

**TABEL 6.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT SEKTOR KOTA DEPOK
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2010-2014 (Juta Rp)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Primer	186.945,98	192.028,72	190.532,79	191.498,19	194.444,85
Sekunder	3.217.727,37	3.382.686,61	3.673.043,15	3.961.167,90	4.274.160,23
Tersier	3.114.652,86	3.373.787,43	3.582.085,95	3.807.871,85	4.056.524,08
PDRB	6.519.326,21	6.948.502,76	7.445.661,89	7.960.537,94	8.525.129,16

*) Angka Sementara

**TABEL 7.1 INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT SEKTOR
KOTA DEPOK ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2014 (Juta Rp)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Primer	12,42	5,13	4,67	14,11	9,49
Sekunder	14,64	9,56	12,28	15,08	15,15
Tersier	22,06	12,37	11,42	17,38	14,95
PDRB	18,33	10,95	11,66	16,30	14,93

*) Angka Sementara

**TABEL 7.2 INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT SEKTOR
KOTA DEPOK ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2010-2014 (Juta Rp)**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Primer	1,94	2,72	-0,78	0,51	1,54
Sekunder	6,91	5,13	8,58	7,84	7,90
Tersier	6,19	8,32	6,17	6,30	6,53
PDRB	6,42	6,58	7,15	6,92	7,09

*) Angka Sementara

TABEL 8.1 DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT SEKTOR KOTA DEPOK ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2014 (Juta Rp) (Persen)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Primer	2,21	2,09	1,96	1,93	1,83
Sekunder	44,65	44,09	44,34	43,87	43,96
Tersier	53,14	53,81	53,70	54,20	54,21
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

TABEL 8.2 DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT SEKTOR KOTA DEPOK ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2010-2014 (Juta Rp) (Persen)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Primer	2,87	2,76	2,56	2,41	2,28
Sekunder	49,36	48,68	49,33	49,76	50,14
Tersier	47,78	48,55	48,11	47,83	47,58
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**TABEL 9.0 INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA DEPOK TAHUN 2010- 2014**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Primer	190,81	195,29	206,01	233,89	252,21
Sekunder	224,05	233,50	241,45	257,64	274,96
Tersier	275,43	285,73	299,85	331,09	357,25
PDRB	247,64	257,80	268,64	292,20	313,60

*) Angka Sementara

**TABEL 10 INFLASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT SEKTOR
KOTA DEPOK TAHUN 2010- 2014**

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Primer	10,28	2,35	5,49	13,53	7,83
Sekunder	7,23	4,22	3,40	6,71	6,72
Tersier	14,95	3,74	4,94	10,42	7,90
PDRB	11,20	4,10	4,20	8,77	7,32

*) Angka Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kota Depok

Jl. Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Cilodong, Depok

Telp. 021-7710370, Fax. 021-77825912

Email: bps3276@bps.go.id